

MADRASAH ERA DIGITAL: ANALISIS WACANA KEBIJAKAN PENDIDIKAN MADRASAH ERA DIGITAL

Asep Abdurrohman

Universitas Muhammadiyah Tangerang

asep.abdurrohman@umt.ac.id

Muhammad Mas'ud

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

mmasud@unis.ac.id

Zulkifli

Universtiras Muhammadiyah Tangerang

zulkifli@umt.ac.id

Abstract

This research uses literature study with various data obtained by the author. Both primary data related to policies and secondary data. The results show that digital era madrasas need attention from policy makers, in this case the Ministry of Religion. The Ministry of Religion has a big responsibility in rearranging Madrasa policies in the digital era. Among the discourses and issues of madrasa policy include: mapping the opportunities and challenges of madrasas, reorienting the vision and mission of teachers, competent teachers, facilities and infrastructure, Management of Educational Components with a systems approach, and dual skill programs.

Abstak

Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan berbagai data-data yang didapatkan penulis. Baik data primer yang terkait dengan kebijakan maupun data-data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa madrasah era digital perlu mendapat perhatian dari pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menata ulang kebijakan Madrasa era digital. Diantara wacana dan isu-isu kebijakan madrasah diantaranya: memetakan peluang dan tantangan madrasah, reorientasi visi dan misi guru, Guru yang kompeten, sarana dan prasarana, manajemen Komponen Pendidikan dengan pendekatan system, dan program keahlian ganda.

Key Words: *Wacana Kebijakan, Madrasah, Era Digital.*

A. Pendahuluan

Sebagai Negara berkembang, Indonesia pada era milenial¹ ini

¹ *Era millennial* berbasis *digital application* dewasa ini menjadi isu utama dalam berbagai lini. Akan tetapi di sisi lain, generasi *millennial* rentan akan *social media harassment* hingga persoalan *cybercrime* yang memberikan pengaruh negatif terhadap kematangan pikir generasi muda. Dalam perkembangannya, media

sosial telah berperan tidak hanya sebagai online interaction namun juga berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Munculnya berbagai komunitas online atau media sosial menjadi fasilitator sosio-politik yang aktif digalakkan kaum muda generasi *millennial*. Generasi *Mileneal* ini tercatat banyak berperan dalam berbagai bidang, baik ekonomi, sosial politik, dan IPTEKS. Di Tiongkok, Joshua Wong yang masih berumur 17 tahun, berhasil memobilisasi 120.000

membutuhkan banyak lembaga pendidikan yang mampu bersaing dengan berbagai macam perubahan. Perubahan² yang kini kita rasakan

orang yang menentang kurikulum berbau komunis. Dalam dunia sosial politik, kericuhan di Timur Tengah yang dikenal dengan arab spirin, misalnya, berasal dari mobilitas melalui facebook oleh para pemuda belia. Di Amerika, keberhasilan Barrack Obama dalam Pemilu presiden memperoleh 66% suara dan John McCain hanya memperoleh 23% suara yang langsung dipilih oleh generasi muda di bawah usia 30 tahun. Di Jakarta, generasi millennial memberikan perubahan iklim politik yang cukup signifikan. Menjelang Pemilu tahun 2017, peminat kursi gubernur DKI Jakarta mulai riuh mengisi media masa. Fenomena menarik yang menjadi bahan pemberitaan media adalah peran generasi millennial yang mengusung jejaring demokrasi berbasis media dan komunitas online dengan memanfaatkan keleluasaan informasi dan teknologi, salah satunya adalah jejaring komunitas TEMAN AHOK. TEMAN AHOK adalah sebuah perkumpulan relawan yang didirikan sekelompok anak muda secara sukarela yang melihat bahwa semenjak kepemimpinan Ahok ini Jakarta mengalami perubahan yang cukup signifikan, terlebih lagi Ahok yang dulunya adalah kader atau anggota partai Gerindra kini telah resmi mengundurkan diri dari partai tersebut dan membuat Ahok berjalan sendiri untuk melakukan perubahan tanpa adanya campur tangan partai politik. TEMAN AHOK yang didirikan para sukarelawan ini bertujuan untuk membantu dan mendorong Gubernur DKI Jakarta basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen serta “menemani”. Lihat Retnayu Prasetyanti (2017). Generasi Milleal dan Inovasi Jejaring Demokrasi Teman Ahok. *Jurnal Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*. Vol. 3 No. 1 (Maret-Agustus 2017) h, 46-47.

² Dinamkia masyarakat yang terus berubah seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang, membuat Guru

adalah berkembangnya teknologi informasi yang demikian cepat kita rasakan pada akhir-akhir ini. Setiap hari kita melihat sekaligus merasakan bahwa kehadiran HP *Smartphone* telah membawa dampak yang tidak sedikit bagi masyarakat dewasa ini.

Selain itu Dunia tengah berada di dalam suatu era kemajuan yang dihubungkan oleh teknologi serta perangkat komunikasi dan informasi berbasis digital. Tersebut tak lain adalah era digital. Era digital bisa dimaknai sebagai suatu keadaan dimana penggunaan perangkat komunikasi dan informasi berbasis digital (internet) semakin masif dan mendominasi berbagai aktivitas keseharian manusia, mulai dari kegiatan ekonomi, kesenian, olahraga, pemerintahan, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya³.

sebagai pelaku perubahan harus benar-benar berubah. Pepatah *latin* mengatakan, *tempora mutantur et nos mutamur in illis* (waktu berubah dan kita berubah karenanya). Ungkapan bijak ini berlaku bagi perjalanan hidup setiap individu, terlebih lagi bagi mereka yang menghayati panggilannya sebagai guru. Ditengah perubahan jaman yang begitu cepat, guru rupanya tertinggal di belakang. Alih-alih menjadi pelaku perubahan, guru malah menjadi persoalan itu. Guru tidak berubah sedangkan masyarakat berubah. Oleh karena itu guru mengalami kiris identitas. Untuk bangkit dari situasi stagnan ini, guru mesti mulai menghayati panggilannya sebagai pelaku perubahan. Mengembangkan visi guru sebagai pelaku perubahan merupakan *condition qua non* bagi pembaharuan dalam dunia pendidikan. lihat Doni Koesoema A. *Pendidik Karakter di Zaman Kebelinger: Mengembangkan Visi Guru sebagai Pelaku Perubahan dan Pendidik Karakter* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018) cet ke-2, h 116.

³ Nuryadin (2017). *Strategi Pendidikan Islam Era Digital*. Jurnal Fitrah Kajian Ilmu-ilmu Keislaman IAIN Padang Vol. 03 No. 1 Juni 2017, hal. 209

Era digital telah merasuk ke berbagai kawasan negara-negara di dunia. Semua saling terhubung satu sama lain. Seakan tiada batas yang menjadi sekat (borderless). Segala informasi terbuka yang ada dalam suatu kawasan dapat diketahui seketika juga oleh penduduk di kawasan lain. Semua itu terjadi karenahadirnya era digital yang telah menggantikan dominasi era konvensional. Era digital sendiri terlahir dari rahim serta pesatnya perkembangan era global atau globalisasi⁴.

Penggunaan beragam HP smartphone yang tidak terbatas pada ruang dan waktu itu. Lambat laun menggusur ruang sosial disekelilingnya. Meski dengan dalih untuk kepentingan pekerjaan, tetap saja ruang sosial dimana ia tinggal dan bergaul jadi semakin sempit. Dalam jangka panjang, perilaku menggunakan kouta HP smartphone yang tidak terkontrol dilihat dari sisi finansial akan menjadi masalah berupa pemborosan. Bagi pasutri, mungkin saja dapat mengganggu keharmonisan rumah yang tidak sedikit berujung pada perceraian.⁵

Bagi kalangan pelajar yang lembaga pendidikannya tidak memberikan aturan ketat membawa HP ke sekolah, tentu harus dipikirkan ulang untuk segera disikapi dengan bijak sesuai arah kebijakan pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Bagi sekolah Madrasah yang sudah diakui dalam

sistem pendidikan nasional, harus berbenah dengan cara merespon bahwa sekolah era digital ini selalu ada dalam dekapan perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat. Maka di sinilah perlunya kebijakan.

Kebijakan dipakai sebagai istilah yang diterjemahkan dari kata “policy”. Policy sendiri secara etimologis diambil dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata “policy” dalam bahasa Yunani adalah “polis” berarti negara kota, sedang bahasa Sanskerta “pur” berarti kota. Kata ini berkembang dalam bahasa Latin “politic” yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris Pertengahan kata “policie” menunjuk kepada perbuatan yang berhubungan dengan masalah kenegaraan dan administrasi pemerintahan. Asal kata “policy” sama dengan asal kata dua kata Latin yaitu “polis” dan “politic”. Kelihatannya hal terakhir ini dapat memberikan penjelasan mengapa dalam bahasa modern, seperti Jerman dan Rusia hanya 3 mempunyai satu kata (politik, politikal) yang keduanya menunjuk kepada kebijakan dan politik.⁶ Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan

⁴ Nuryadin, *Strategi Pendidikan Islam Era Digital*, 210

⁵ Asep Abdurrohman. *Menakar Aspek Sosial Gadgets*. Lihat <http://koran.sindo.com/page/news/2018-02-01/1/1/> diakses 10 April 2018.

⁶ “KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pdf,” 3, diakses 10 April 2018 http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINIS/TRASI_PENDIDIKAN/195306121981031-UDIN_SYAEFUDIN_SA%27UD/Kebijakan_Pend.-Bapenas_2002.pdf.

dan bagaimana mencapai tujuan tersebut⁷.

Sebagaimana di kemukakan oleh Mark Olsen & Anne-Maie O'Neil kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan. Marget E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan⁸.

Dalam beberapa kesempatan penulis melihat beberapa sekolah yang ada di lingkungan Tangerang dengan program field tripnya, sekolah umum bercirikan keagamaan mengalokasikan biaya field trip tersebut memakan uang puluhan juta rupiah. Namun hasilnya seperti yang sudah diungkap oleh Direktur Lembaga pendidikan sekolah tersebut tidak sebanding dengan hasil yang ditawarkan. Dengan kata lain direktur lembaga pendidikan ingin mengatakan bahwa agenda kegiatan field trip jika tidak menemukan hasilnya maka bisa terkategori pemborosan. Maka

selang 1 tahun kemudian, anggaran field trip dikurangi dari yang semestinya.

Untuk itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Marget E. Goertz bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan, harus benar-benar dibuktikan dalam bentuk kebijakan yang mempunyai target yang tepat guna. Untuk mengurainya, maka dibutuhkan analisis kebijakan pendidikan⁹ yang dapat membantu efektivitas anggaran pendidikan.

Dari beberapa pendapat di atas bahwa kebijakan pendidikan lebih menitik beratkan pada pada system pendidikan yang di dalamnya terdapat efektivitas pendidikan, pembiayaan, tujuan pendidikan plus dilengkapi dengan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut.

Menurut hasil survey INFID (*intenasional NGO forum on Indonesia develomment*) tahun 2016 di enam kota besar di Indonesia yakni: Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Pontianak, dan Makassar menyebutkan

⁹Patton dan Sawicki (1986) sebagaimana dikutip oleh Nanang Fattah mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu rangkaian proses dalam menghasilkan kebijakan. Sementara Stokey dan Zekhauser (1986) mengatakan bahwa analisis kebijakan pendidikan adalah suatu proses rasional dengan menggunakan metode dan teknik yang rasional pula. Selanjutnya mereka mempersempit analisis kebijakan hanya diperuntukan bagi para pembuat keputusan yang rasional sebagai penentu tujuan kebijakan dan yang menggunakan logika dalam menelusuri cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan. Lihat Nanang Fattah. *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) cet ke-3. Hal. 3

⁷<http://eprints.uny.ac.id/9473/2/bab%20%20-NIM%2007110241019.pdf> diakses 10 April 2018

⁸<http://eprints.uny.ac.id/9473/2/bab%20%20-NIM%2007110241019.pdf> diakses 10 April 2018

bahwa penggunaan lini masa (media social) yang paling dominan digunakan adalah *Facebook*, *Twitter*, dan *Youtube* untuk bertukar informasi secara cepat dan murah.

Lalu hasil survey tersebut mengatakan dari total responden 1200 responden berusia 15-30 tahun, 60,4% setiap hari mengakses internet, 7,4% 3-4 hari seminggu, 2,1% 1-2 hari seminggu, 16,4% jarang mengakses internet, dan 13,8% tidak tahu menahu soal dunia maya. Aktivitas yang paling sering dilakukan anak muda adalah membuka laman media social 31,3%, 21,8% komunikasi surat elektronik, 18,1% akses portal berita, 13,2% hiburan, 7,7% belanja kebutuhan sehari-hari, 8% tidak tahu cara mengakses internet. Dan platform linimasa yang digunakan meliputi: FB 64,8%, Youtube 6,3%, Twitter 5,9%, Blog 0,5%, 22,5% lain-lain. Untuk mengakses internet anak muda saat ini lebih banyak menggunakan HP 87,8%, jasa warnet 5,8%, jaringan internet di rumah 3,6%, kantor 1,6%, dan 1,3% tidak menjawab¹⁰.

Melihat data yang menakutkan tersebut, maka madrasah era digital ini harus segera bersikap dengan aneka kebijakan yang dapat mempertahankan keutuhan Madrasah dari segala virus milenial yang dapat meluluhlantakkan eksistensi lembaga pendidikan Madrasah.

B. Metodologi Penelitian

¹⁰ Asep Abdurrohman. *Menakar Aspek Sosial Gadgets*. Lihat <http://koran.sindo.com/page/news/2018-02-01/1/1/> diakses 10 April 2018.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Sumber data primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian dianalisis oleh peneliti dengan pendekatan analisis konten.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sejarah muncul dan Berkembangnya Madrasah

Jika dikaji dari pengertian bahasa, istilah madrasah merupakan isim makan (nama tempat), berasal dari kata "*darasa*", yang bermakna tempat orang belajar, kemudian berkembang menjadi istilah yang dipahami oleh masyarakat sebagai tempat pendidikan, khususnya yang bernuansa agama Islam.¹¹ Karenanya, istilah madrasah tidak hanya diartikan sekolah dalam arti sempit, tetapi juga bisa dimaknai rumah, istana, kuttub, perpustakaan, surau, masjid, dan lain-lain, bahkan seorang ibu juga bisa dikatakan madrasah pemula¹². Madrasah sebagai lembaga pendidikan dalam bentuk formal¹³ telah dikenal sejak abad ke-11 atau ke-12 M (abad ke-5-6 H), yaitu sejak dikenal adanya Madrasah Nizamiyah yang didirikan di Bagdad oleh Nizâm al-Mulk, seorang wazir dari Dinasti Saljuk.¹⁴

¹¹ M. Maskur. *Eksistensi dan Esensi Pendidikan Madrasah di Indonesia* ejournal.radenintan.ac.id/index.php/terampil/article/download/1807/1480 diakses 10 April 2018.

¹² Suwito, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005). H. 214

¹³ Sedangkan Lembaga pendidikan masa Islam Klasik ada yang bernama: Suffah, Kuttub/Maktab, Majlis, Halaqoh, Mesjid, Khan, Ribath, rumah-rumah ulama, perpustakaan, observatorium, dan rumah sakit. Lihat Erlan Muliadi, *Madrasah: Sejarah kelahirannya hingga Nizamiyah*, Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam El-Hikmah Vol. 9, No. 2 Desember 2015. Hal. 47-49.

¹⁴ Abdul Rachman Saleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi, dan Aksi*,

Akar munculnya madrasah sebagai lembaga formal dalam pendidikan Islam berasal dari masjid yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan tempat pendidikan. Pada mulanya dalam masjid hanya terdapat satu halaqah pengajaran ilmu pengetahuan. Pada perkembangan selanjutnya halaqah bertambah sehingga masjid tidak memungkinkan lagi dijadikan sebagai tempat aktivitas halaqah tersebut. Muncullah gagasan untuk membuat bangunan di samping masjid yang masih menyatu dengan bangunan masjid yang disebut masjid khan. Selanjutnya muncullah madrasah yang berdiri sendiri, terpisah dari masjid. Namun pada perkembangan selanjutnya masjid ternyata diperlukan oleh madrasah, dibangunlah masjid dalam lingkungan madrasah¹⁵.

Dalam tahap selanjutnya, kemunculan madrasah di Indonesia di latar belakang oleh akibat sikap colonial Belanda yang diskriminatif terhadap rakyat Indonesia. Untuk menghadapi keadaan yang tidak adil ini, pada tahun 1898 Abdullah Ahmad mendirikan Madrasah yang bernama Adabiyah School¹⁶ di Padang, Sumatra Barat. Di madrasah ini para pelajar bukan hanya

diberikan pengetahuan agama, melainkan juga pengetahuan umum, pelajaran bahasa Arab, Inggris, Belanda.¹⁷

Kenyataan ini timbul karena kesadaran umat Islam yang dalam, setelah sekian lama mereka terpuruk di bawah kekuasaan penjajah. Sebab pada jaman Belanda pintu masuk pendidikan modern bagi umat Islam terbuka secara sangat sempit. Dalam hal ini minimal ada dua hal yang menjadi penyebabnya, yaitu sikap dan kebijaksanaan colonial Belanda yang diskriminatif terhadap kaum muslimin sebagaimana dijelaskan di atas oleh KM AKhirudin. Lantas politik non kopratif para ulama terhadap Belanda yang memfatwakan bahwa ikut serta dalam budaya Belanda, termasuk pendidikan modernnya adalah suatu bentuk penyelewangan terhadap agama¹⁸.

Berbeda dengan Abuddin Nata, ahli pendidikan Islam Armai Arief mengatakan bahwa ada dua faktor yang melatar belakang kemunculan madrasah. *Pertama*, adanya pandangan yang mengatakan bahwa system pendidikan Islam tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat. *Kedua*, adanya kekhawatiran¹⁹ atas kecepatan

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. ke-1, h. 11

¹⁵ Ainurrafiq Dawam & Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2004), Cet. ke-1, h. 31

¹⁶ Belum cukup satu tahun madrasah ini gagal berkembang dan dipindahkan ke Padang. Pada tahun 1915 madrasah ini mendapat pengakuan dari Belanda dan berubah menjadi Hollands Inlandshe School (HIS) lihat KM Akhirudin, *Lembaga Pendidikan Islam Nusantara*, Jural Tarbiya UIN SGD, Vol. , No. 1 2015. Hal, 206

¹⁷ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet ke-1. Hal. 111.

¹⁸ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia: Napak tilas Perubahan Konsep, Filsafat, dan metodologi Pendidikan Islam dari era Nabi Sampai Ulama Nusantara* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012) Cet Ke-1, hal, 347-348

¹⁹ Untuk menyeimbangkan perkembangan sekulerisme, kaum reformis khususnya dari kalangan Muhammadiyah, kemudian memasukan pendidikan Islam dalam persekolahan melalui pembangunan madrasah.

perkembangan sekolah Belanda, yang menimbulkan pemikiran sekuler di masyarakat.²⁰

Pada masa pendudukan Jepang, ada satu hal yang istimewa dalam dunia pendidikan yaitu sekolah-sekolah telah diseragamkan dan dinegerikan meskipun sekolah swasta lain, seperti Muhammadiyah, Taman Siswa dan lain-lain diizinkan terus berkembang dengan pengaturan dan diselenggarakannya oleh pendudukan Jepang²¹. Sementara itu khususnya pada masa awal-awalnya, madrasah dibangun dengan gencar-gencar selagi ada angin segar dari Jepang walau lebih bersifat politis. Ini tampak dengan berdirinya madrasah Awaliyah yang diilhami oleh Majelis Islam Tinggi. Meskipun dunia pendidikan secara umum terbengkalai karena murid-muridnya setiap hari disuruh gerak badan, baris berbaris, kerja baki (romusha), bernyanyi dsb dan madrasah yang ada dilingkungan pondok pesantren bebas dari pengawasan Jepang dan berjalan dengan wajar.²²

Pada era orde lama, perkembangan madrasah berlangsung sangat cepat. Pada pertengahan tahun 1960-an terdapat 13.057

Pemerintah colonial Belanda pada waktu itu sangat kuatir jika sekolah yang dibangun para reformis itu akan menentang atau membahayakan pemerintah colonial Belanda. Oleh karena itu Belanda membatasi kegiatan dengan cara Guru harus lapor dan kurikulum yang diajarkan harus dilaporkan ke Belanda, Lihat Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam* (Ciputat: CSR Group, 2007) cet ke-2 Hal, 59

²⁰ Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam* (Ciputat: CSR Group, 2007) cet ke-2 H, 58-59

²¹ A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) Ed.Revisi cet-2, Hal, 110

²² A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hal, 110

MI (Madrasah Ibtidaiyah) dengan jumlah murid yang mendaftar diri sekitar 1.927.777 siswa. Jumlah MTs (SMP) terdapat 776 madrasah dengan siswa 87.932 orang. Sedangkan tingkat madrasah aliyah (MA) terdapat 16 madrasah dengan jumlah siswa 1.881 orang. Ditahun 1966, pemerintah mengizinkan swasta berubah statusnya menjadi madrasah negeri. Alhasil, ada 123 MI, 182 MTs, dan 43 MA yang menjadi madrasah negeri.konsekwensinya, manajemen madrasah secara total bergeser dari masyarakat ke pemerintah. Meskipun demikian, sekitar 90% madrasah masih dikelola masyarakat setempat dalam bentuk yayasan²³.

Perkembangan yang sangat cepat tersebut karena ditopang oleh peran Kementrian Agama sebagai andalan politis yang dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus di kalangan pengambil kebijakan. Tentunya tanpa melupakan usaha-usaha keras yang suda dirintis oleh KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asy'ari, dan Mahmud Yunus. Dalam hal ini, Kementrian Agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu Madrasah.²⁴

Madrasah sebagai lembaga pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-undang No. 4 1950 tentang dasar-dasar

²³ Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam*, 59

²⁴ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia: Napak tilas Perubahan Konsep, Filsafat, dan metodologi Pendidikan Islam dari era Nabi Sampai Ulama Nusantara*, hal, 349.

pendidikan dan pengajaran di sekolah pada pasal disebutkan” belajar di sekolah Agama yang telah mendapat pengakuan Kementrian Agama, sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar”. Untuk mendapat pengakuan dari Kemenag, madrasah harus memberikan pelajaran Agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit enam (6) jam seminggu secara teratur disamping mata pelajaran umum.²⁵ Perkembangan Madrasah cukup penting pada masa Orde Lama adalah berdirinya Pendidikan Guru Agama (PGA)²⁶ dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan adalah untuk mencetak tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli dalam bidang keagamaan.²⁷

Pada awal pemerintahan orde baru, pendekatan legal formal yang dijalankannya tidak memberikan dukungan pada madrasah. Tahun 1972 Presiden Suharto mengeluarkan keputusan Presiden (Keppres) No. 34 th 1972 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Mendikbud yang sebelumnya di kelola Kementrian Agama. Tetapi kebijakan tersebut mendapat tantangan keras dari pihak

muslim karena dinilai sebagai usaha sekulerisme dan menghilangkan madrasah dari system pendidikan di Indonesia.²⁸ Untuk menenangkan reaksi tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan keputusan bersama antara Mendikbud, Menag, dan Mendagri. Isinya, mengembalikan status pengelolaan madrasah di bawah Menag, tetapi harus memasukan kurikulum umum yang sudah ditentukan pemerintah. Walaupun kurikulum yang diterapkan pada madrasah itu bersifat sentralistik. Berbeda dengan pesantren yang baru diakui sebagai bagian dari system pendidikan dalam UU No. 20 tahun 2003, secara legal madrasah sudah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional sejak diberlakukannya UU Sisdiknas No. 2 tahun 1989.²⁹

Diakui bahwa banyak yang telah tercapai di dalam perkembangan selama Orde baru. Dari salahsatu bangsa yang termiskin di dunia menjadi bangsa di dalam kelompok bangsa-bangsa yang berpendapatan menengah. Namun demikian, perkembangan yang pesat dilihat dari segi pendapatan perkapita telah mengorbankan Hak asasi manusia dan kemerdekaan individu.³⁰ Di dalam bidang politik segala sesuatu diarahkan kepada uniformitas atau keseragaman di dalam berpikir dan bertindak. Pakaian seragam, wadah wadah tunggal dari organisasi sosial masyarakat, semua

²⁵ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia: Napak tilas Perubahan Konsep, Filsafat, dan metodologi Pendidikan Islam dari era Nabi Sampai Ulama Nusantara*, hal, 350

²⁶ Pendidikan Guru Agama sebenarnya sudah ada sebelum kemerdekaan di wilayah minangkabau, yang dinamakan Normal School didirikan oleh Mahmud Yunus, dari sinilah kemudian Kemenag mengambil ide mendirikan PGA. Lihat Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*, hal, 351

²⁷ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia: Napak tilas Perubahan Konsep, Filsafat, dan metodologi Pendidikan Islam dari era Nabi Sampai Ulama Nusantara*, hal, 351

²⁸ Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam*, 60

²⁹ Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam*, 60-61

³⁰ H.A.R Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) Cet Ke-3, Hal, 3.

diarahkan kepada terbentuknya masyarakat yang homogeny. Stabilitas politik dan keamanan dijadikan ajaran utama untuk mencapai perkembangan ekonomi yang tinggi. Akibatnya perkembangan kelas menengah yang lamban, lemah, tidak kreatif dan produktif, dan diarahkan oleh birokrasi yang kaku. Selain itu tantangan politik dan sosial yang homogeny telah mematikan kehidupan demokrasi. Lahirlah kepemimpinan “mohon petunjuk” dan “mohon pengarahan Bapak”.³¹

Ini agaknya yang menjadi perkembangan madrasah berlangsung cepat. Ditingkat MI, siswa mencapai 11 persen dari total siswa tingkat dasar. Ditahun 1999, terdapat 21.454 MI dan sekitar 93,2% diselenggarakan oleh pihak swasta. Di MTs pendaftarannya mencapai 18,35% dari total siswa tingkat lanjutan pertama. Tahun 1999 terdapat 9.860 madrasah dan sekitar 88,1% merupakan madrasah milik swasta.³²

Melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut, kini umat Islam sudah memiliki berbagai keahlian dalam bidang ilmu, keterampilan, dan keahlian yang sangat beragam. Demikian peran dan fungsi yang dimainkan pun tidak hanya terbatas pada sector informal keagamaan melainkan sudah masuk sector formal dan pemerintahan dengan peran dan fungsi yang sangat beragam dan strategis. Diantara tamatan lembaga pendidikan Islam sudah ada yang menjabat dirjen, pemimpin organisasi

kemasyarakatan yang besar dan disegani, anggota legislative, pemimpin pondok, guru, dai, hakim, wartawan, dan pengusaha.³³

2. Problem Pendidikan Madrasah Dewasa ini

Problematika yang dihadapi oleh pendidikan Islam tidak tunggal dan parsial. Bisa dibilang problematika yang merudung keberadaan pendidikan Islam saat ini berkaitkelindan sehingga nampak kusut. Ada sejumlah problem atau masalah yang masih membelit yang saling terkait satu sama lain. Menurut Achmadi problem utama pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam, adalah kualitas pendidikan yang rendah yang memicu rendahnya kualitas SDM. Rendahnya kualitas SDM berimbas pada rendahnya karakter bangsa.³⁴ Problem lain yang dihadapi oleh pendidikan Islam seperti problem ideologis, dualisme sistem pendidikan Islam, bahasa, dan problem metode³⁵ pembelajaran³⁶.

³³ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) hal, 223

³⁴ Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet ke-2, hal. 162 Lihat juga Nanah Fattah. *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) cet ke-3, hal, 29-32

³⁵ Kelemahan kegiatan pendidikan di madrasah salasatunya dalam hal motedologi pendidikan dan pendekatan system pengajaran yang digunakan. Misalnya: metode ceramah, diskusi, Tanya jawab, penugasan, demonstrasi, role model, atau pengajaran dengan pola rekreatif. Lihat Anas Salahudin, *Filsafat Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hal, 178

³⁶ S. Lestari dan Ngatini, *Pendidikan Islam Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet ke-1, hlm. 84

³¹ H.A.R Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, hal, 3

³² Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam*, 61.

Problem ideologis menyangkut lemahnya inisiatif dan komitmen sebagian umat Islam dalam menghubungkan penguasaan ilmu pengetahuan dengan kemajuan-kemajuan. Akibatnya semangat dalam menuntut ilmu, utamanya ilmu pengetahuan sains, belum menjadi kultur di kalangan mayoritas umat Islam. Pemahaman Islam yang reduktif dan parsial menjadi pemicu mengapa penguasaan ilmu pengetahuan tidak mendapat tempat yang utama. Problem ideologis ini begitu akut yang berdampak pada rendah serta tidak meratanya kualitas generasi kaum muslim.³⁷ disamping itu budaya sains tingkat kemelakan teknologi dalam pendidikan madrasah masih kurang mendapat tempat. Hal ini sangat beralasan karena paham teologis yang dominan pada kalangan umat masih cenderung meminggirkan ilmu-ilmu yang berbau sains terlebih pandangan bahwa dengan menimba pengetahuan agama sudah dikatakan cukup.³⁸

Tahap selanjutnya pengelolaan lembaga pendidikan di bawah Kementerian menyisakan masalah yang tidak berujung. Tumpang tindih diantara tiga Kementerian yaitu: Kementerian Agama, Kemendikbud dan Kemenristek Dikti. Meskipun pengelolaan upaya

dalam memecahkan masalah tersebut sudah ada tetapi belum menemukan titik nadirnya. Selain itu masalah penguasaan bahasa, metodologi pembelajaran, penguasaan media digital yang masih terbatas di kalangan guru-guru, relevansi pendidikan madrasah dengan dunia kerja, dan yang tak kalah pentingnya adalah motivasi belajar untuk terus meningkatkan kemampuan sebagai guru masih sangat minim dan di lapangan banyak ditemukan guru yang demikian.

3. Wacana Pendidikan Madrasah Era Digital

a. Peluang dan Tantangan Madrasah

Pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia baru, yaitu masyarakat Madani Indonesia, tentunya mengalami hambatan dan tantangan. Secara internal, tantangan tersebut antara lain: kesatuan bangsa, demokratisasi pendidikan, desentralisasi manajemen pendidikan dan kualitas pendidikan. dilihat dari eksternal tantangan pendidikan dewasa terkait dengan globalisasi yang membutuhkan sikap kompetitif dan inovatif dan kehilangan identitas akibat tergerus arus globalisasi.³⁹

Selain itu, Era digital yang sedang berlangsung sekarang ini membawa dampak yang begitu besar bagi kehidupan umat manusia dewasa ini. Banyak sektor kehidupan yang mengalami perubahan dan kemajuan berkat teknologi yang dihadirkan di era ini. Pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional juga tak bisa

³⁷ Nuryadin, *Strategi Pendidikan Islam Era Digital*. Jurnal Fitrah Kajian Ilmu-ilmu Keislaman IAIN Padang Vol. 03 No. 1 Juni 2017, hal 214

³⁸ Azyumardi Azra, *Madrasah dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Historis-Sosiologis Pendidikan Islam*. makalah dalam Buku *Madrasah Masa Depan* (Jakarta: INCIS, 2004) hal 60.

³⁹ H.A.R Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, hal, 9-18

dilepaskan begitu saja dari keberadaan dan pengaruh teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology*) di era digital⁴⁰.

Bahkan keterlibatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan mutlak yang mesti dimiliki dan dimanfaatkan perguruan tinggi (termasuk lembaga pendidikan jenjang lainnya, dari penulis) jika ingin meningkatkan penyelenggaraan pendidikannya⁴¹. Atas dasar hal tersebut, maka pendidikan Islam mesti segera berbenah dan menyiapkan dirinya untuk terlibat aktif di dalamnya.

Selain yang sudah disinggung di atas oleh Tilaar, banyak peluang⁴² dan

⁴⁰ Nuryadin, *Strategi Pendidikan Islam Era Digital*. Jurnal Fitrah Kajian Ilmu-ilmu Keislaman IAIN Padang Vol. 03 No. 1 Juni 2017, hal 212

⁴¹ Ricardus Eko Indrajit dan Ricardus Djikopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), hlm. 339. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan (akuisisi), pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Lihat Deni Darmawan, *Teknologi Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 1.

⁴² Senada dengan Nuryadin, Umi Aisyah mengatakan bahwa Globalisasi ini membawa dampak positif dan negatif bagi kepentingan bangsa dan Negara kita. Dampak positif, misalnya kita semakin mudah memperoleh informasi dari luar yang membantu kita menemukan alternatif-alternatif baru dalam usaha memecahkan masalah yang kita hadapi. (misalnya melalui internet kini kita dapat mencari informasi dari seluruh dunia tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dan tanpa harus kita ke lokasi sumber berita tersebut). Di bidang ekonomi, perdagangan bebas antarnegara berarti pasar dunia semakin terbuka bagi produk-produk kita, baik yang berupa barang ataupun

tantangan yang muncul di era ini. Peluang-peluang yang ditawarkan sejatinya dapat menjadi modal dan kesempatan berharga bagi pendidikan Islam agar dapat menampilkan dirinya sebagai sebuah keunggulan di tengah-tengah aneka peradaban global. Sementara tantangan dapat dilihat sebagai pijakan untuk mengeksplorasi kelebihan yang dimiliki sekaligus mengevaluasi berbagai kekurangan yang selama ini melingkupi pendidikan Islam. Peluang besar yang ditawarkan pada era ini khususnya bagi perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan Islam di antaranya adalah terbukanya informasi bagi masyarakat guna mengakses informasi pendidikan serta programnya, kesempatan untuk berkiprah secara optimal dalam berbagai bidang, saling terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kerja sama dengan berbagai lintas instansi, dan lain sebagainya.⁴³

Adapun tantangan dan masalah internal pendidikan pasca modernisasi dan tantangan globalisasi pada hari ini dan masa depan, secara umum adalah:

- 1) Jenis pendidikan yang dipilih dan dilaksanakan di Indonesia. Ada empat jenis pendidikan

jasa (tenaga kerja). Dampak negatifnya adalah masuknya informasi yang tidak kita perlukan atau bahkan merusak tatanan nilai yang selama ini kita anut. Misalkan masuknya gambar-gambar atau video porno yang masuk lewat jaringan internet, masuknya paham politik yang berbeda dari paham politik yang kita anut, dan sebagainya. lihat Umi Aisyah, *Revitalisasi Madrasah untuk menghadapi tantangan Globalisasi* journal.ummgl.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/download/262/198 diakses 10 April 2018.

⁴³ Nuryadin, *Strategi Pendidikan Islam Era Digital*. Jurnal Fitrah Kajian Ilmu-ilmu Keislaman IAIN Padang Vol. 03 No. 1 Juni 2017, hal 212.

Islam yang disediakan yakni: (1) pendidikan yang berpusat pada *tafaqquh fi al-din*. (2) pendidikan madrasah yang mengikuti kurikulum Diknas dan Depag. (3) Sekolah Islam “plus” atau unggulan yang mengikuti kurikulum Diknas, yang pada dasarnya adalah pendidikan umum plus agama. (4) pendidikan ketrampilan seperti SMK⁴⁴.

- 2) Berkaitan dengan masalah pertama, yakni persoalan identitas diri lembaga pendidikan Islam tertentu. Pada satu sisi, pengakuan atas penyetaraan pendidikan di atas telah membuka peluang-peluang bagi penyelenggara pendidikan Islam, namun permasalahan selanjutnya yang justru lahir adalah kemungkinan mengorbankan identitas pendidikan Islam itu sendiri. Terjadi perbenturan antara *social expectations* dan *academic expectations*⁴⁵.
- 3) Penguatan kelembagaan dan manajemen. Hal ini dapat dilihat dari, perubahan-perubahan pengelolaan dan manajemen pendidikan Islam, seperti dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern diantaranya total quality manaegement (TQM), atau corporate good governance,

⁴⁴ Azyumardi Azra, Madrasah dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Historis-Sosiologis Pendidikan Islam .makalah dalam Buku *Madrasah Masa Depan* (Jakarta: INCIS, 2004) hal, 58-59.

⁴⁵Azyumardi Azra, *Madrasah dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Historis-Sosiologis Pendidikan Islam* makalah dalam Buku *Madrasah Masa Depan* (Jakarta: INCIS, 2004) hal, 49 dan 61

yang kini telah mulai diterapkan pada sementara lembaga-lembaga pendidikan selain Islam.⁴⁶

Sedangkan tantangan eksternal yang muncul adanya pertarungan ideologi- ideologi besar dunia. Selain itu juga menghadapi berbagai kecenderungan (tantangan) yang menurut Daniel Bell sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata⁴⁷ ditandai dengan lima hal yaitu,

- 1) Kecenderungan *integrasi* ekonomi yang menyebabkan terjadinya persaingan bebas dalam dunia pendidikan.
- 2) Kecenderungan *fragmentasi* politik yang menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan dan harapan dari masyarakat. Hal ini bisa dijumpai dalam pendidikan Islam seperti model pembelajaran yang akomodatif dan partisipatoris.
- 3) Kecenderungan penggunaan teknologi canggih (*sofisticated technology*) khususnya teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer. Pendidikan Islam tak ketinggalan untuk memanfaatkan

⁴⁶ Umi Aisyah, *Revitalisasi Madrasah untuk menghadapi tantangan Globalisasi*. journal.umngl.ac.id index.php/tarbiyatuna/article/download/262/198 diakses 10 April 2018. Lihat juga Azyumardi Azra, *Madrasah dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Historis-Sosiologis Pendidikan Islam* makalah dalam Buku *Madrasah Masa Depan* (Jakarta: INCIS, 2004) hal 62

⁴⁷ Lihat juga Mastuhu, *Madrasah dan Tantangan Pendidikan Modern* makalah dalam Buku *Madrasah Masa Depan* (Jakarta: INCIS, 2004) hal. 121-131

kemajuan teknologi tersebut dalam urusan pendidikannya.⁴⁸

- 4) Kecenderungan *interdependency* (kesalingtergantungan), yaitu suatu keadaan di mana seseorang baru dapat memenuhi kebutuhannya apabila dibantu oleh orang lain. Pendidikan Islam memiliki ketergantungan pada tuntunan masyarakat dan pengguna lulusan.
- 5) Kecenderungan munculnya penjajahan baru dalam bidang kebudayaan (*new colonization in culture*) yang mengakibatkan terjadinya pola pikir (*mindset*) masyarakat pengguna pendidikan, yaitu dari yang semula mereka belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan intelektual, moral, fisik dan psikisnya, berubah menjadi belajar untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang besar⁴⁹.

b. Reorientasi Visi dan Misi Guru

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Peserta didik memerlukan peran seorang guru untuk membantunya dalam proses perkembangan diri dan pengoptimalan bakat dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Tanpa adanya seorang guru, mustahil seorang peserta didik dapat mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Hal ini berdasar pada pemikiran manusia sebagai makhluk

sosial yang selalu memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi semua kebutuhannya⁵⁰.

Oleh karena itu, Menurut hemat penulis diperlukan serangkaian telaah dan proses pembelajaran yang panjang, agar peran guru betul betul mempunyai ruh pendidik yang mengelaborasi perkembangan kekinian⁵¹. Diantara yang harus dijalani adalah *Pertama*: Visi dan misi ulil al bab. Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an surah Al-Imran: 190-191⁵² dapat diketahui, bahwa visi guru sebagai ulil al-bab adalah menjadi orang yang memiliki keseimbangan antara daya pikir dan daya nalar dengan daya zikir dan spiritual. Dengan daya ini, maka seorang guru mengemban misi mempergunakan dayanya itu secara optimal untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga keberadaannya tidak menjadi orang yang sia-sia.⁵³

Kedua :Visi dan misi al-ulama. Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an surah Fatir, (35) ayat 27-28⁵⁴ diketahui bahwa sebagai ulama ia menjadi orang yang mendalami ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian terhadap alam jagad raya fauna, flora, ruang angkasa, geologi, fisika, dan sebagainya yang disertai

⁵⁰ Asep Abdurrohman, *Menyegarkan Kembali Profesi Pendidik* <https://www.radarbanten.co.id/menyegarkan-kembali-profesi-pendidik/> diakses 10 April 2018.

⁵¹ Asep Abdurrohman, *Menyegarkan Kembali Profesi Pendidik* lihat <https://www.quareta.com/post/menyegarkan-kembali-profesi-pendidik> diakses 10 April 2018

⁵³ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, hal, 347. Lihat juga Asep Abdurrohman, *Menyegarkan Kembali Profesi Pendidik* <https://www.radarbanten.co.id/menyegarkan-kembali-profesi-pendidik/>

⁴⁸ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, hal. 14-15

⁴⁹ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, hal. 16-17. Lihat Nanah Fattah. *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) cet ke-3, hal, 28.

keikutsertaan naluri intuisi dan fitrah batinnya untuk menyadari bahwa jagad raya yang dijadikan objek penelitiannya adalah ciptaan dari Allah SWT. Dengan demikian, seorang guru harus memiliki visi menjadi seorang ilmuwan yang senantiasa takut kepada Allah SWT, dan melaksanakan misi untuk menggunakan ilmunya itu untuk kemajuan masyarakat sebagai amanah Allah SWT.⁵⁵

Ketiga: Visi dan misi al-muzakki. Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an surah Al-Baqarah:129, dan Al-Imran: 164, dijelaskan bahwa visi guru adalah al-muzakki yaitu menjadi orang yang memiliki mental dan karakter yang mulia.

Sedangkan misinya adalah membersihkan dirinya dan anak didiknya dari pengaruh akhlak yang buruk serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya.

Keempat: Visi dan misi ahl al-dzikr. Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an surah Al-Anbiya: 7⁵⁶, visi guru sebagai ahl al-dzikr adalah menjadi orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki expert judgement, keahlian yang diakui kepakarannya sehingga ia pantas menjadi tempat bertanya, menjadi rujukan, dan memiliki otoritas untuk memberikan pembenaran atau pengakuan atas berbagai temuan ilmiah. Sedangkan misinya adalah memperbaiki, membimbing, meluruskan, dan

mengingatkan serta memberikan keputusan atas perilaku yang dilakukan anak didiknya.

Kelima: Visi dan misi *al-rasikhuna fi al-'ilm*. Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an surah An-Nisa': 162, diketahui bahwa visi *al-rasikhuna fi al-'ilm* adalah menjadi orang yang memiliki kemampuan bukan hanya pada dataran fakta dan data, inferensial, atau prestechen terhadap data dan fakta tersebut.⁵⁷

c. Guru Profesional

Jabatan pendidik (guru) merupakan jabatan yang amat strategis dalam menunjang proses dan hasil kinerja pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidik merupakan gerbang awal sekaligus representasi kondisi dan kinerja pendidikan. dengan kata lain posisi guru mempunyai peran penting dalam mencapai perwujudan kinerja pendidikan secara efektif.⁵⁸

Di dalam al-Qur'an QS. Annisa ayat 58, Alla Berfirman:” *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah*

⁵⁵ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, hal, 348-349. Lihat juga Asep Abdurrohman, *Menyegarkan Kembali Profesi Pendidik*

⁵⁷ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, hal 350-351. Asep Abdurrohman, *Menyegarkan Kembali Profesi Pendidik* lihat <https://www.quareta.com/post/menyegarkan-kembali-profesi-pendidik>.

⁵⁸ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2015) Cet ke-12, ,hal, 126

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Dengan mengutip hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Imam Al-Maraghi berpendapat, bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan penyerahan kunci Ka'bah dari Rasulullah kepada Usman Ibnu Thalhah pada peristiwa futhu makkah. Pada saat itu ada keluarga Nabi Saw, seperti Ali bin Abi Thalib dan Al- Abbas yang ingin mendapatkan kepercayaan mengurus kunci ka'bah tersebut. Tetapi Nabi tetap menyerahkan kepada Usman Ibnu Thalhah karena dianggap lebih ahli, berpengalaman, professional dibandingkan dengan yang lain.⁵⁹

Isyarat di atas menunjukkan bahwa pemegang kunci ka'bah harus benar-benar ahli, dan professional dalam menjalankan amanah. Terlebih guru di sekolah sebagai faktor paling penting disamping yang lain harus betul-betul mempunyai profesionalisme keguruan sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 mengatakan bahwa Guru dan Dosen harus mempunyai kualifikasi: pedagogik, professional⁶⁰, kepribadian dan sosial.

d. Manajemen Komponen Pendidikan dengan pendekatan system

Kegiatan belajar mengajar tidak akan berlangsung dengan lancar tanpa melibatkan segenap komponen yang ada di dalam lembaga pendidikan. kegiatan

belajar mengajar yang berbasis system memang sangat dibutuhkan dalam suatu lembaga pendidikan. kita sering mendengar lembaga pendidikan kacau balau karena konflik kepentingan ditubuh di lembaga pendidikan. Maka disinilah fungsi leader untuk mengatur segala sumber daya pendidikan agar tidak saling bertubrukan dengan kepentingan parsial dan sebaliknya diarahkan ke kepentingan bersama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam upaya membangun bangsa dari segala keterpurukan mental.

Menurut Reja Mudyaharja sebagaimana dikutip Ramayulis, pendekatan system adalah cara-cara berpikir dan bekerja yang menggunakan konsep-konsep teori system yang relavan dalam memecahkan masalah.⁶¹ walaupun pada awalnya pendekatan system ini digunakan dalam bidang teknik tetapi akhir tahun 1950 dan awal 1960-an, pendekatan sistema diaplikasikan dalam bidang pendidikan seperti merumuskan masalah, analisis kebutuhan, analisis masalah, desain metode, dan materi intrksional pelaksanaan secara eksperimental, menilai dan merivisi dll. Dengan demikian pendekatan system merupakan proses pemecahan masalah yang logis untuk mencapai hasil pendidikan secara efektif dan efisien.⁶²

Model ini bila diaplikasikan dalam pendidikan Islam dengan memasukan komponen lain dalam pengembangannya, maka akan terlihat sebagai berikut:

Gambar 1.1 **Model Dasar Sistem Pendidikan Islam⁶³**

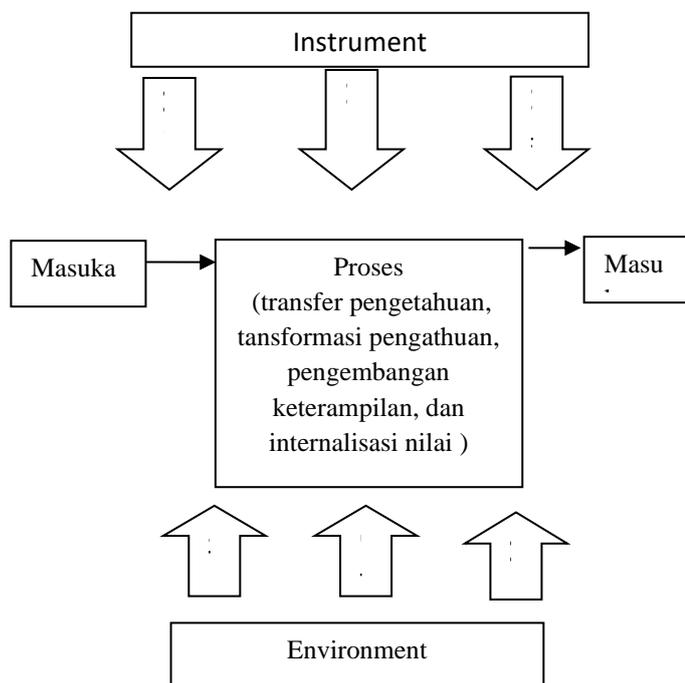
⁶¹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, hal, 50

⁶² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, hal, 50

⁶³ Lihat Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, hal, 51

⁵⁹ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, hal, 221

⁶⁰ Professional diartikan ahli, atau orang-orang yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya dan kemudian dia mendapatkan penghargaan karena pekerjaannya itu. Lihat Hamka Abdul Aziz, *Karakter Guru Profesional: melahirkan Murid Unggul, menjawab Tantangan masa Depan* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2012) hal, 90



5. Sarana Prasarana

Pembenahan infrastruktur menjadi suatu keniscayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta sebagai respon terhadap globalisasi. Utamanya adalah infrstruktur berbasis teknologi digital. Hampir sebagian besar aktivitas pendidikan seperti administrasi manajemen, pembelajaran, dan lainnya, dapat memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Maka ketersediaan fasilitas infrastruktur yang mendukung menjadi jawaban dari tuntutan tersebut.⁶⁴

Pendidikan Islam mesti menyadari urgennya ketersediaan infrastruktur teknologi digital guna memudahkan kegiatan pendidikan. Kerap kali kendala dalam kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan administrasi berkaitan dengan tidak atau kurang tersedianya infrastruktur. Inilah yang harusnya

⁶⁴ Nuryadin, *Strategi Pendidikan Islam Era Digital*, h, 219. Lihat juga Doni Koeseoma A., *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018) Cet, ke-4, h, 212-216.

dibenahi agar kedepannya pendidikan Islam mampu berbicara lebih baik. Namun aspek pembiayaan⁶⁵ menjadi problem bagi pendidikan Islam dalam menyediakan infrastruktur berbasis *teknologi digital*. Butuh biaya yang tidak sedikit untuk memenuhinya. Karenanya, diperlukan strategi dan skema pembiayaan yang kompetitif. Pemerintah dan kalangan swasta dalam hal ini dapat diajak bekerjasama untuk menyediakan pembiayaan guna memenuhi ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan di atas.⁶⁶ Karena kegiatan belajar mengajar terdiri dari beberapa komponen yang saling terikat dan harus dirancang sedemikian rupa agar semua komponen tersebut dapat berperan sebagaimana mestinya.⁶⁷

Selain itu Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besardalam berbagai bidang kehidupan manusia. Pendidikan sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendewasaan manusia tentu di satu sisi memiliki andil yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, namun di sisi lain pendidikan juga perlu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berpengaruh terhadap

⁶⁵ Dalam islam sumber pembiayaan pendidikan bersumber dari wakaf, zakat, sedekah, Hibah, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Lihat Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2015) Cet ke-12, ,hal, 424-430

⁶⁶ Nuryadin, *Strategi Pendidikan Islam Era Digital*, h, 219.

⁶⁷ Baiq Widia Nita Kasih, *Penerapan Metode Inquiry pada mata pelajaran Fiqh dan dampaknya terhadap Motivasi Belaja Siswa*. Jurnal el-Hikmah IAIN Mataram Vol. 9, No. 2 tahun 2015. Hal, 880.

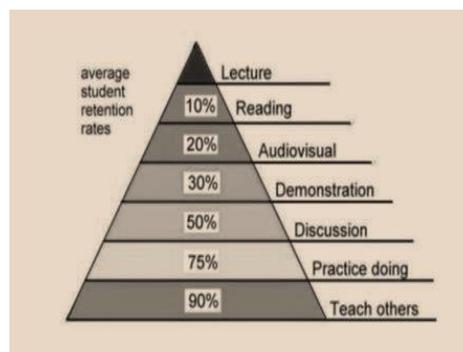
penggunaan alat-alat bantu mengajar di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Dewasa ini pembelajaran di sekolah mulai disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga terjadi perubahan dan pergeseran paradigma pendidikan⁶⁸.

Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran di kelas, sudah menjadi suatu kebutuhan sekaligus tuntutan di era global ini. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, perlu dikembangkan berbagai model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Hal ini perlu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terkesan kurang menarik, monoton dan membosankan sehingga akan menghambat terjadinya transfer of knowledge. Oleh karena itu peran media dalam proses pembelajaran menjadi penting karena akan menjadikan proses pembelajaran tersebut menjadi lebih bervariasi dan tidak membosankan. Pada hakikatnya proses pembelajaran merupakan proses komunikasi atau penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan berupa materi pelajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi baik verbal (kata-kata dan tulisan) maupun nonverbal. Pesan inilah yang akan ditangkap oleh peserta didik sebagai sebuah pengetahuan, keterampilan maupun nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Agar pesan tersebut tersampaikan secara efektif tentu membutuhkan sarana atau media yang memadai⁶⁹.

Dalam kenyataannya retensi siswa atau daya tangkap siswa sangat dipengaruhi oleh model aktivitas belajar yang dilakukan guru. Siswa hanya dapat menyerap 5% bahan pembelajaran apabila aktivitas ceramah dilakukan oleh guru dalam membelajarkan siswa. Sedangkan apabila aktivitas belajar dilakukan dengan teman sebaya, daya retensi siswa mencapai 90%⁷⁰.

Gambar 1.2

Efektivitas Pembelajaran



Sumber gambar:
<http://jessieanggraini.blogspot.com/2014/>
diakses 6 Juni 2018

Penelitian Eyler dan Giles, membuktikan bahwa keefektifan pembelajaran dipengaruhi oleh media yang digunakan guru. Mereka menemukan bahwa model pembelajaran yang letaknya paling atas dalam kerucut, yakni pembelajaran yang hanya melibatkan symbol-simbol verbal melalui

⁶⁸ Ali Muhson, *Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia. Vol. VIII No. 2 tahun 2010. Hal, 1

⁶⁹ Ali Muhson, *Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi*.

Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia. Vol. VIII No. 2 tahun 2010. Hal, 2.

⁷⁰ Ali Muhson, *Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia. Vol. VIII No. 2 tahun 2010. Hal, 2.

sajian teks adalah pembelajaran yang menghasilkan tingkat abstraksi paling tinggi. Pembelajaran yang paling efektif adalah pembelajaran yang berada pada dasar kerucut, yakni terlibat langsung dengan pengalaman-pengalaman belajar yang bertujuan. Tingkat abstraksi pada model pembelajaran ini sangat rendah sehingga memudahkan siswa dalam menyerap pengetahuan dan keterampilan baru⁷¹.

Oleh karena itu Kepala Sekolah harus berfungsi sebagai, *educator*, *manajer*, *administrator*, *supervisor*, *innovator*, dan *motivator* harus benar-benar mendapat tempat di lapangan terlebih fungsi kepala sekolah sebagai orang yang selalu memberikan motivasi untuk memberikan materi pelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menantang siswa menjadi ingin tau dan mengundang penasaran⁷².

Dengan demikian segala sarana dan prasarana yang akan menunjang terhadap keberhasilan belajar mengajar seperti: proyektor, Laptop, Komputer, jaringan internet, software belajar jarak jauh (e-

learning), kamera, buku penghubung berbasis daring, dan lain lain harus mendapat perhatian dari para pemangku kebijakan baik dari kalangan swasta berupa yayasan maupun pemerintah berupa Kemendikbud atau Dinas Kotan/Kabupaten di Indonesia.

f. Program keahlian Ganda

Program keahlian ganda⁷³ yang di gagas oleh Mendikbud Muhadjir Efendi,

⁷³ Program Keahlian Ganda tahap pertama, yaitu tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyeleksi 12.741 guru SMK normatif (guru pengampu mata pelajaran wajib, seperti pendidikan kewarganegaraan atau bahasa Indonesia). Saat ini mereka sedang menjalani pelatihan sebagai guru SMK produktif, yaitu guru pengampu mata pelajaran bidang keahlian. Program Keahlian Ganda merupakan langkah strategis Kemendikbud untuk mengatasi masalah kekurangan guru produktif di SMK. Dirjen GTK Sumarna Surapranata menuturkan, Kemendikbud sudah melakukan pemetaan mengenai kekurangan jumlah guru produktif, termasuk bidang keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan data per tahun 2016, Indonesia memiliki kekurangan guru SMK produktif sebanyak 91.861 guru. Program Keahlian Ganda tahap pertama lalu berhasil menyeleksi 12.741 guru, dan akan bertambah 15.000 di tahap kedua pada tahun ini. Program Keahlian Ganda tahap II untuk guru SMK siap dibuka pada Juli 2017. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membuka rekrutmen Program Keahlian Ganda bagi 15.000 guru normatif yang akan dilatih menjadi guru produktif untuk bidang keahlian prioritas nasional dalam pendidikan vokasi. Rekrutmen ini bisa diikuti guru SMK negeri maupun swasta. “Ada empat bidang keahlian yang menjadi prioritas sesuai arahan presiden, yaitu bidang maritim atau kelautan, bidang pertanian atau ketahanan pangan, bidang industri kreatif, dan bidang pariwisata,” ujar Dirjen GTK Sumarna Surapranata, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (27/4/2017). Lihat <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/04/program-guru-keahlian-ganda-tahap-ii-siap-dibuka>, diakses 6 Juni 2018.

⁷¹ Ali Muhson, *Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia. Vol. VIII No. 2 tahun 2010. Hal, 2.

⁷² Abdul Basyit, *Strategi Kepala Madrasah Tsanawiyah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan Agama Islam Rausyan Fikr UMT. Vol. 13, No. 2 Tahun 2017. H, 103-106. Lihat juga Zainal Arif dan Zulfitra, *Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Kepercayaan Diri terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Ekonomi Islam*. Jurnal Pemikiran dan Pencerahan Agama Islam Rausyan Fikr UMT. Vol. 12, No. 2 Tahun 2016. Hal, 1205-1212. Lihat juga Zainal Arif dan Zulfitra, *Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Kepercayaan Diri terhadap Hasil Belajar Tahfidz Al-Qur'an*. Jurnal Pemikiran dan Pencerahan Agama Islam Rausyan Fikr UMT. Vol. 12, No. 2 Tahun 2016. Hal, 971-977.

telah menuai pro dan kontra di kalangan praktisi pendidikan. kebijakan keahlian ganda bagi guru di sekolah kejuruan ini, disatu sisi dinilai mempunyai kelebihan bahwa guru-guru supaya tidak terjebak pada rutinitas⁷⁴ sehar-sehari. Dilain pihak menurut PB PGRI, program keahlian ganda yang tidak linear dengan latar belakang keiluan justru akan menimbulkan bahaya bagi peserta didik.

Program keahlian ganda sangat diperlukan, mengingat situasi dan kondisi di lapangan begitu beragam kemampuannya. Ditambah dengan dinamika pekerjaan guru yang selalu tetap dan teratur membuat guru bisa terjerumus dalam jebakan rutinitas. Guru mengikuti jadwal sekolah yang tertata rapih, dari jadwal harian, kalender akademis semester dan tahunan, serta jadwal kegiatan yang bersifat rutin (ulangan harian, ulangan semester, ujian sekolah, acara perpisahan, pertemuan

orangtua siswa, rapat guru, dll)⁷⁵. Dinamika ini terus berlangsung setiap tahun. Selain itu guru juga cenderung mengajar siswa dengan tahap perkembangan yang hampir sama setiap tahun. Guru juga mengalami rutinitas cara mengajar dan materi yang diajarkan. Guru SD misalnya, cenderung mengajar seluruh mata pelajaran selama bertahun-tahun pada murid yang usianya selalu sama. Sementara sekolah menengah pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) cenderung mengajar satu mata pelajaran yang sama selama bertahun-tahun dengan materi yang sama⁷⁶. Tentu kita bisa dapat mengajukan pertanyaan dampak dari rutinitas guru tersebut?. Ini adalah pertanyaan yang tidak mudah dijawab dengan reaktif singkat, melainkan harus melalui serangkain penelitian yang mendalam untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ending dari program keahlian ganda yang di gagas di bawah pemerintahan Jokowi-JK ini, adalah guru-guru mampu menguasai proses pembelajaran berbasis IT.

C. Simpulan

Lembaga pendidikan Islam akan mengalami kemajuan, jika memperhatikan aspek di bawah ini:

1. Kebanggaan akan keberhasilan madrasah masa silam, idealnya tidak dijadikan kebanggaan yang berlebihan sehingga lupa posisi kondisi sosial dalam konteks kekinian.

⁷⁴ Jika kita telisik lebih cermat, kultur sekolah, lingkungan kerja, dan dinamika harian guru tampaknya lebih membentuk guru sebagai orang yang bekerja berdasarkan rutinitas, ritme, dan keteraturan. Padahal logika perubahan seringkali berbeda dengan logika rutinitas dan keteraturan. Tidak mengherankan jika keberadaan guru sebagai pelaku perubahan seringkali tidak dapat tumbuh dengan baik. Setidak-tidaknya, keberadaan mereka sebagai pelaku perubahan dipertanyakan. Dinamika harian guru tampaknya lebih cenderung menjaga stabilitas dan rutinitas. Stabilitas dan rutinitas lebih dekat dengan gagasan akan status quo daripada dinamika perubahan dan kreatifitas yang seringkali bersifat non rutin. Keteraturan, irama, dan jadwal merupakan istilah yang menyertai kehidupan guru. Tanpa ada keteraturan dan rutinitas guru tidak dapat bekerja dan bisa jadi malahan kehilangan orientasi. Situasi ini bisa membuat guru terjebak dalam rutinitas yang memandulkan kreativitas dan inovasi dalam kinerja guru. Lihat Doni Koesoema A., *Pendidik Karakter di Zaman Kebelinger: Mengembangkan Visi Guru sebagai Pelaku Perubahan dan Pendidik Karakter* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018) cet ke-2, h, 39.

⁷⁵ Lihat Doni Koesoema A., *Pendidik Karakter di Zaman Kebelinger: Mengembangkan Visi Guru sebagai Pelaku Perubahan dan Pendidik Karakter*, h, 39.

⁷⁶ Lihat Doni Koesoema A., *Pendidik Karakter di Zaman Kebelinger: Mengembangkan Visi Guru sebagai Pelaku Perubahan dan Pendidik Karakter*, h, 39

2. Menyadari bahwa era digital adalah era keterbukaan informasi yang menguras kesadaran sosial kolektif.
3. Pemetaan problem pendidikan di suatu lembaga pendidikan mesti dilakukan
4. Wacana kebijakan pendidikan pada madrasah meliputi: peningkatan SDM pendidikan, manajemen lembaga pendidikan, dan peningkatan sarana dan prasarana, program keahlian ganda.

D. Daftar Pustaka

- “KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pdf,” 3, diakses 10 April 2018 http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/195306121981031-UDIN_SYAEFUDIN_SA%27UD/Kebijakan_Pend.-Bapenas_2002.pdf.
- A, Doni Koeseoma. (2018). *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global* (Jakarta: Kompas Gramedia) Cet, ke-4
- Abdul Basyit. (2017). Strategi Kepala Madrasah Tsanawiyah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Pemikiran dan Pencerahan Agama Islam Rausyan Fikr UMT*. Vol. 13, No. 2.
- Abdurrohman, Asep. *Menakar Aspek Sosial Gadgets*. Lihat <http://koran.sindo.com/page/news/2018-02-01/1/1/> diakses 10 April 2018.
- Abdurrohman, Asep. *Menyegarkan Kembali Profesi Pendidik* <https://www.radarbanten.co.id/menyegarkan-kembali-profesi-pendidik/> diakses 10 April 2018
- Abdurrohman, Asep. *Menyegarkan Kembali Profesi Pendidik* lihat <https://www.quareta.com/post/menyegarkan-kembali-profesi-pendidik> diakses 10 April 2018
- Achmadi. (2008). *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke-2.
- Ali Muhson. (2010). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*. Vol. VIII No. 2.
- Arief, Armai. (2007). *Reformulasi Pendidikan Islam*. Ciputat: CSR Group, cet ke-2.
- Aziz, Hamka Abdul. (2012). *Karakter Guru Profesional: melahirkan Murid Unggul, menjawab Tantangan masa Depan* .Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Azra, Azyumara. (2004). Madrasah dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Historis-Sosiologis Pendidikan Islam .makalah dalam Buku *Madrasah Masa Depan*. Jakarta: INCIS.
- Baiq Widia Nita Kasih. (2015). Penerapan Metode Inquiry pada mata pelajaran Fiqh dan dampaknya terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal el-Hikmah IAIN Mataram* Vol. 9, No. 2..
- Darmawan, Deni. (2012). *Teknologi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dawam, Ainurrafiq & Ahmad Ta'arifin. (2004). *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. Jakarta: Lista Fariska Putra, Cet. ke-1.
- ejournal.radenintan.ac.id/index.php/terampil/article/download/1807/1480 diakses 10 April 2018.

- Erlan Muliadi. (2015). Madrasah: Sejarah kelahirannya hingga Nizamiyah, *Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam El-Hikmah* Vol. 9, No. 2 Desember.
- Fattah, Nanag. (2014). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. cet ke-3
<http://eprints.uny.ac.id/9473/2/bab%20%20-NIM%2007110241019.pdf> diakses 10 April 2018
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/04/program-guru-keahlian-ganda-tahap-ii-siap-dibuka>, diakses 6 Juni 2018
- Indrajit, Ricardus Eko dan Ricardus Djikoprano. (2006) *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- KM Akhirudin. (2015). Lembaga Pendidikan Islam Nusantara, *Jurnal Tarbiya UIN SGD*, Vol. , No. 1.
- Koeseoma, Doni .(2018). *Pendidik Karakter di Zaman Kebelinger: Mengembangkan Visi Guru sebagai Pelaku Perubahan dan Pendidik Karakter*. Jakarta: Kompas Gramedia. cet ke-2,
- Lestari, S dan Ngatini. (2010). *Pendidikan Islam Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke-1.
- Mastuhu. (2004). Madrasah dan Tantangan Pendidikan Modern makalah dalam Buku *Madrasah Masa Depan* .Jakarta: INCIS.
- Mustafa, A. dan Abdullah Aly. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia. Ed.Revisi cet-2
- Nata, Abuddin (2012). *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet ke-1
- Nata, Abuddin. (2011). *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- (2015). *Ilmu Pendidikan Islam* . Jakarta: Kalam Mulia, Cet ke-12.
- Nuryadin. (2017). Strategi Pendidikan Islam Era Digital. *Jurnal Fitrah Kajian Ilmu-ilmu Keislaman IAIN Padang*, Vol. 03 No. 1 Juni.
- Ramayulis. (2012). *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia: Napak tilas Perubahan Konsep, Filsafat, dan metodologi Pendidikan Islam dari era Nabi Sampai Ulama Nusantara*. Jakarta: Kalam Mulia. Cet Ke-1
- Retnayu Prasetyanti. (2017). Generasi Milleal dan Inovasi Jejaring Demokrasi Teman Ahok. *Jurnal Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*. Vol. 3 No. 1.
- Salahudin. (2011). Anas, *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh, Abdul Rachman. (2004). *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi, dan Aksi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1.
- Suwito. (2005). *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tilaar, H.A.R, (2010). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet Ke-3.

Umi Aisyah. (2018). *Revitalisasi Madrasah untuk menghadapi tantangan Globalisasi*.
journal.ummgl.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/download/262/198
8 diakses 10 April 2018.

Zainal Arif dan Zulfitra. (2016).
Pengaruh Strategi Pembelajaran

dan Kepercayaan Diri terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Ekonomi Islam. *Jurnal Pemikiran dan Pencerahan Agama Islam Rausyan Fikr UMT*. Vol. 12, No. 2.